

Strategi Komunikasi dan Pembangunan Pusat Masyarakat Perikanan

Marzuki Noor

Abstract: Peran serta masyarakat adalah merupakan sasaran sekaligus alat mencapai tujuan pembangunan, masyarakat sendirilah yang lebih memahami kebutuhan serta prioritasnya, karenanya merekalah yang berperan sebagai pelaku dan pengambil manfaat. Strategi pembangunan desa hanya dapat diwujudkan sepenuhnya dengan menggerakkan keterlibatan aktif dan organisasi pada tingkat paling dasar atau masyarakat desa terutama pada tingkat tidak beruntung. Masyarakat pada lapisan terbawah ini perlu organisasi tersendiri, perselisihan antar mereka diselesaikan dengan cara mereka dan yang menguntungkan mereka. Dalam organisasi campuran, kepentingan utama yang miskin jarang tercermin. Tidak ada cara-cara yang sederhana mengobati dan menyelesaikan masalah tersebut, tetapi pendekatan yang lebih sabar, lengkap, terpadu dan serempak untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan perikanan skala kecil akan memberikan hasil positif yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. Bentuk-bentuk dasar organisasi pada tingkat dasar dapat digerakkan bersamaan dengan partisipasi mereka, dan untuk itu diperlukan upaya menghimpun dan menggerakkan bentuk-bentuk organisasi dasar dan partisipasi sehingga terbentuk Pusat Masyarakat Perikanan (PMP) yang dinamis. Komponen-komponen PMP terdiri dari: warga masyarakat nelayan, bentuk organisasi dasar (himpunan nelayan, himpunan pedagang, yayasan perkreditan dsb), pemilik fasilitas (perorangan, koperasi, swasta, atau pemerintah), tim pengawas, dan UPP terjalin dalam suatu ikatan kerja integratif dalam PMP. Strategi komunikasi dalam pembangunan PMP pada hakikatnya merupakan cara untuk menggerakkan bentuk organisasi dasar dan partisipasi dari masyarakat nelayan dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan mengawasi. Jadi dalam pembangunan PMP lebih ditekankan pada pemberian pengalaman keikutsertaan nelayan dalam membangun diri dan lingkungannya sendiri.

Keywords: komunikasi, pusat masyarakat perikanan

Pembangunan menurut paradigma baru didefinisikan sebagai suatu proses partisipasi di segala bidang dalam perubahan sosial dalam suatu masyarakat, dengan tujuan membuat kemajuan sosial dan material termasuk pemerataan, kebebasan besar untuk mengatur lingkungannya (Rogers, 1985). Cochrane (Conyers, 1984) menyatakan bahwa pembangunan ditujukan untuk menciptakan peluang bagi masyarakat miskin agar dapat menjadi kehidupan yang lebih layak bagi mereka sendiri yang penting adalah bukan kenyataan bahwa diperlukan adanya suatu proyek sebagaimana yang diinginkan oleh para pejabat nasional baik atau internasional, tetapi adanya proyek yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dapat

dan akan mengambil keuntungan yang ditawarkan oleh adanya proyek itu sendiri, yang akhirnya akan menimbulkan perubahan hidup masyarakat secara permanen.

Perikanan skala kecil baik di darat maupun di laut telah memberikan lapangan kerja dan mata pencaharian bagi nelayan, keluarganya, dan buruh. Berbeda dengan industri perikanan besar, usaha perikanan skala kecil ini menggunakan sumber yang lebih asli dan hemat biaya, energi, perlengkapan, prasarana dan devisa. Usaha ini juga sering memberikan "benefit cost ratio" yang lebih besar daripada usaha perikanan besar, lebih efektif menyumbang swasembada dan ekonomi nasional serta menghasilkan keuntungan sosial lebih banyak.

Dalam satu lingkungan masyarakat nelayan, jika diamati mekanisme sirkulasi barang dan jasa, informasi serta teknologi relatif lebih dinamis dan lebih cepat daripada dalam kehidupan masyarakat petani. Tetapi dalam kenyataannya nelayan sebagai pelaku utama produksi justru berada pada pihak yang paling tidak beruntung.

Komunikasi dalam Pembangunan

Komunikasi pembangunan dalam arti luas adalah meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, terutama antara masyarakat dan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan (Nasution, 1988). Selanjutnya, dikatakan dalam arti sempit komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan, dan ditujukan pada masyarakat luas.

Menurut Schramm (1985) tugas komunikasi dalam perubahan sosial adalah: (1) Menyampaikan informasi kepada masyarakat pembangunan nasional, (2) Memberikan kesempatan kepada individu-individu dalam masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, (3) Tugas mendidik masyarakat, seperti diajarkan cara membaca, cara bertani dan sebagainya. Sebagai pemberi informasi dan sebagai pendidik dapat dilakukan oleh media massa, sedangkan dalam fungsinya sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan diperlukan intensitas komunikasi interpersonal.

Dalam kaitannya dengan pendekatan terhadap komunikasi pembangunan Dissayanake (Nasution, 1988) menggambarkan bahwa pembangunan sebagai "...proses perubahan sosial bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan alam dan kultural tempat mereka berada, dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan menjadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri". Selanjutnya, Dissayanake mengelompokkan pendekatan komunikasi dan pembangunan ini: (a) Pendekatan I, yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui industri dengan model komunikasi satu arah (linear), (b) Pendekatan II, dengan memperhatikan pemerataan, kemandirian,

pentingnya peran kebudayaan, pemaduan media komunikasi, kesadaran sejarah dan perhatian pada faktor penghambat, pendekatan ini menerapkan model komunikasi lebih menekankan pada proses (dua arah), (c) Pendekatan III, dengan melenyapkan hubungan yang tidak simetris (interdependensi) antara Negara maju dan Negara berkembang, model komunikasi lebih menekankan pada komunikasi antar pribadi, (d) Model IV, merupakan pendekatan yang mengandalkan kemampuan diri (*self reliance*), pendekatan ini memadukan ide-ide memaksimalkan partisipasi masyarakat, memulai dan mendasarkan pembangunan pada masyarakat paling bawah (*grassroot level*), pembangunan desa secara terpadu, penggunaan teknologi tepat guna (*appropriate technology*), dan pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar (*basic need*).

Dalam kajian tentang Pembangunan Pusat Masyarakat Perikanan (PMP) ini lebih cenderung pada model pendekatan IV, yang orientasinya memaksimalkan partisipasi masyarakat nelayan dengan menggerakkan bentuk-bentuk dasar organisasi/kelompok nelayan dan buruh nelayan sebagai lapisan masyarakat paling bawah. Keterpaduan pembangunan ini mencakup keterpaduan vertikal yang berkaitan dengan proses produksinya dan keterpaduan secara horizontal dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Penerapan teknologi tepat guna bagi nelayan baik dalam proses produksi, penanganan maupun dalam proses pengolahannya. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat nelayan dengan mudah dapat dipenuhi jika keterpaduan horisontal dapat berhasil, sehingga aspek kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Strategi komunikasi menurut Rogers (Mardikanto, 1988) bahwa strategi komunikasi pembangunan merupakan suatu rencana atau pola untuk merubah perilaku manusia melalui transfer atau penyampaian ide baru atau inovasi. Selanjutnya, dikatakan bahwa strategi komunikasi pembangunan dapat diartikan sebagai metode yang terpilih untuk merubah perilaku manusia melalui penyampaian inovasi yang terseleksi, dalam rangka perbaikan mutu hidupnya sendiri dan masyarakat. Menurut AED (Nasution, 1988) ada empat strategi komunikasi pembangunan, yaitu (1) Strategi-strategi yang didasarkan pada media yang dipakai (*media-based strategi*), (2) Strategi desain instruksional, (3) Strategi partisipatori, dan (4) Strategi pemasaran.

Dalam kajian tentang strategi komunikasi pembangunan PMP ini lebih menekankan pada strategi

partisipatori. Dengan menggerakkan/mengorganisir bentuk-bentuk dasar organisasi/kelompok nelayan serta kegiatannya akan melahirkan partisipasi masyarakat, gerak dan arah yang dilakukan sendiri oleh masyarakat nelayan merupakan wujud pertumbuhan pribadinya. Dengan demikian, dalam pembangunan PMP ini lebih ditekankan pada pengalaman keikutsertaan nelayan dalam membangun dirinya dan lingkungannya. Keikutsertaan masyarakat ini sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Pembangunan Perikanan Terpadu

Pembangunan perikanan seiring dengan peningkatan kontribusi sub sektor perikanan dilaksanakan melalui peningkatan produksi perikanan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah (*processing*), peningkatan pendapatan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan perluasan kesempatan kerja. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka tujuan pembangunan perikanan Pelita V (Dirjen Perikanan, 1989) adalah: (1) Meningkatkan produksi dan mutu hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, bahan baku industri serta meningkatkan ekspor hasil perikanan. (2) Meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan nilai tambah serta meningkatkan pendapatan nelayan dan petani ikan. (3) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta menunjang pembangunan daerah. (4) Meningkatkan pembinaan kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan hidup.

Membangun bermakna mengubah perilaku masyarakat secara berencana, membangun sub sektor perikanan bukan semata peningkatan produksinya melalui perubahan-perubahan struktur masyarakatnya saja, tetapi mencakup perubahan pola nilai serta peranannya. Ada tiga aspek yang dapat diperhatikan dalam proses pembangunan (Ben-Yami, 1986) yaitu: (1) Peningkatan mutu dan tingkat kehidupan, (2) Kemajuan sosial dalam arti persamaan dan hak perorangan, (3) Perbaikan teknoekonomi dalam arti peningkatan kondisi dan nilai produksi serta suplai. Aspek-aspek tersebut yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program pembangunan, termasuk merencanakan program pembangunan sub sektor perikanan ini.

Membangun sub sektor perikanan berarti membangun orang-orang yang bergerak dalam bidang perikanan, membangun orang-orang yang memproduksi menangkap ikan, membangun cara menangkap,

menangani, mengolah, memasarkan ikan. Membangun tempat tinggal, berlayar, berlabuh, pendaratan ikan, melelang, membeli alat dan bahan berlayar, sarana dan prasarana dimana masyarakat penangkap ikan itu berada. Membangun jaringan sosial, ekonomi, jasa, informasi, termasuk organisasi dsb dimana masyarakat nelayan itu akan memanfaatkannya. Jika hal itu dapat direncanakan dan diimplementasikan secara terpadu, terintegrasi, melibatkan peran mereka, di tempat mereka, dalam keterjangkauan mereka, maka akan terciptalah masyarakat perikanan yang diandalkan.

Pembangunan perikanan yang terpadu ini berbentuk keterpaduan vertikal maupun keterpaduan horizontal. Proyek atau program yang berkaitan dengan rantai produksi perikanan, dari pengolahan sumber sampai penangkapan, pengolahan dan pemasaran dalam hubungannya dengan pembuatan kapal, pembekalan, dsb, hal ini lebih dikenal dengan keterpaduan vertikal. Keterpaduan horisontal akan mengarahkan sumber dan mengkoordinir upaya di luar sektor perikanan dengan tujuan seperti penyediaan perbaikan air, pelayanan kesehatan, pendidikan, hiburan, tempat peribadatan, listrik, pasar, bank, dsb. Atau permasalahan yang muncul dalam keterpaduan horisontal adalah sulitnya perencanaan dan koordinasi, karena lebih banyak lembaga, badan atau organisasi yang terlibat. Namun, akar yang mempengaruhi masyarakat nelayan tidak dapat ditangani sungguh-sungguh kecuali perhatian yang sama juga diberikan untuk kebutuhan di luar dan menciptakan satu lingkungan dimana kemajuan dan percaya diri sosial dapat dicapai. Keterpaduan vertikal dari rantai produksi adalah merupakan mesin ekonomi yang dapat membantu memantapkan dan memelihara aspek horisontal yang terorganisir dari kesejahteraan masyarakat.

Tujuan jangka panjang program pembangunan perikanan skala kecil yang terpadu ini adalah pembinaan bertahap terhadap masyarakat nelayan yang terorganisir secara baik dan mandiri. Nelayan akan mendapatkan segala kemudahan yang diperlukan untuk: operasi (berlayar), mendapat pelayanan kredit, nasehat dan bantuan teknis. Akan mudah mendapatkan pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, listrik, warung, rekreasi dsb. Dengan terciptanya pusat masyarakat perikanan baik dalam pertumbuhan kelembagaan vertikal maupun horisontal akan terciptalah iklim pedesaan yang mampu menyedot angkatan kerja dan sekaligus perikanan yang mempunyai

tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan dapat dijawab.

Penduduk desa pantai (nelayan) dengan segala keterbatasan kemampuan, keterampilan, dan kuatnya tekanan pedagang atau juragan, masih mampu mempertahankan hidup diri dan keluarga. Ketangguhan untuk bertahan hidup dalam keterbatasannya itu merupakan kekuatan dahsyat jika dihimpun dalam jaringan, kelompok atau kelembagaan yang ada dalam jangkauannya (waktu, tempat, kemampuan dan kelasnya), baik untuk produksi, pengolahan, maupun dalam pemasarannya. Bagaimana kemampuan pihak luar merancang dan menggerakkan potensi tersebut sehingga mereka mampu bergabung dalam satu kelompok yang mempunyai kekuatan untuk menentukan nasib mereka sendiri di tengah keterpaduan vertikal dan horisontal tersebut. Ada tiga pilihan dasar untuk mengangkat nelayan, yaitu (1) Membiarkan mereka membangun sendiri, (2) mendukung usaha perseorangan yang ditentukan untuk dan dipilih oleh peserta atau kelompok sasaran, sehingga dapat menegakkan kemandekkan situasi dan diikuti oleh percepatan pembangunan di bidang yang lebih luas dengan harapan, dan (3) Pembangunan masyarakat nelayan dengan pelayanan, fasilitas, organisasi dan kelembagaan yang diperlukan untuk keadaan masyarakat yang mandiri.

Dalam konsep Chambers (1982) bahwa terhadap masyarakat desa sebagai kelompok yang tidak beruntung, berada dalam kemiskinan terpadu dalam "deprivasi" ketidakberdayaan, terisolasi, kerawanan, kemiskinan, dan kelemahan fisik, ia mengajukan konsep mendahulukan yang terakhir dengan arus balik yaitu upaya memperlambat, menghentikan, bahkan membalikkan proses yang menjerumuskan mereka dalam kesengsaraan, hal ini diperlukan orang-orang profesional jiwa pelopor dan mempunyai aliran multi disiplin. Pandangan Mosher (1969) tentang pemecahan masalah pedesaan dengan struktur pedesaan progresif. Ben-Yami (1986) dengan konsepnya Pusat Masyarakat Perikanan dengan menggerakkan bentuk-bentuk dasar organisasi nelayan dan partisipasinya pada desa pantai untuk menghentikan deprivasi kemiskinan terpadu seperti yang digambarkan oleh Chambers.

Pembangunan Pusat Masyarakat Perikanan (PMP)

Makna Pusat Masyarakat Perikanan (PMP) adalah kompleks fasilitas dan pelayanan yang dijalin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan setempat. Strukturnya bisa terletak dalam satu tempat atau lokasi, dapat juga tersebar dalam satu desa bila diperlukan secara khusus untuk menyesuaikan dengan kemungkinan desa tertentu. Hal yang penting adalah bahwa fasilitas-fasilitas yang diperlukan ada, dan ditempatkan secara fisik dan dijalankan dengan pengaturan yang layak satu sama lain dan dalam keterjangkauan masyarakat.

Secara spesifik PMP bertujuan: (1) Agar masyarakat nelayan dapat berproduksi dengan baik, tanpa ikatan dengan juragannya, (2) Dapat menjual hasilnya dengan harga yang layak, (3) Dapat menjangkau kebutuhan hidupnya dengan cepat, dalam lingkungan masyarakatnya sendiri yang meliputi: (a) dapat membeli kebutuhan pokok (sandang, pangan), maupun kebutuhan penunjang lainnya dengan mudah dan murah. (b) Dapat menerima pelayanan teknis produksi dan pemasaran dengan mudah. (c) dapat menerima pelayanan sosial, informasi dsb dengan cepat.

Beberapa komponen pokok PMP meliputi: (1) Warga masyarakat nelayan, (2) Bentuk dasar kelompok/organisasi (himpunan nelayan, himpunan pengolah, himpunan pedagang, himpunan wanita nelayan, dsb), (3) Penyelenggara/pemilik fasilitas dan pelayanan (perseorangan, koperasi, perusahaan swasta, pemerintah), (4) Tim pengawas (wakil nelayan, pemerintah, wakil UPP, wakil penyelenggara, wakil tim ahli), dan (5) UPP (Unit Pembinaan Perikanan) adan pemerintah desa. PMP bukanlah sekadar merupakan kumpulan gudang, toko, bengkel, dsb, melainkan merupakan pusat kehidupan perikanan di desa. Di sinilah nelayan menyatakan kebutuhannya, memenuhi kebutuhannya, memperoleh penyuluhan, merundingkan harga, pengiriman barang, mendapatkan pelayanan sosial lainnya.

Pada dasarnya siapa saja bisa menyelenggarakan komponen PMP, perorangan, kelompok nelayan, koperasi, maupun pemerintah. Di samping, komponen-komponen, kegiatan dan penyelenggaraan tinggal di tempat lain, menetap sementara di PMP tersebut. Pada umumnya komponen-komponen besar seperti

pabrik es, listrik, *cold storage* diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi pihak swasta juga diberi kesempatan luas untuk itu.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PMP

Setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau menyangkut aspek sosial, karenanya dapat dianggap bahwa perencanaan merupakan bentuk keputusan yang memberikan arahan dan pedoman bagi perilaku manusia. Conyers (1984) mengemukakan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat diperlukan dalam perencanaan pembangunan, (1) partisipasi masyarakat merupakan alat untuk mengetahui informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, (2) masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih memahami dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) partisipasi adalah hak demokrasi untuk ber"urutan rembug" dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Metode mendapatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, di antaranya dikemukakan oleh Conyers (1984) yang menyatakan bahwa pembangunan masyarakat (*community development*) akan memungkinkan adanya keuntungan yang tidak diperoleh dengan metode yang lain. Beberapa nilai lebih selain dapat memperoleh partisipasi dari masyarakat, dengan pendekatan pembangunan masyarakat dalam merencanakan PMP adalah: (1) dengan melibatkan sumber-sumber dan tenaga setempat serta kemampuan organisasi dan manajerial lokal, maka akan membentuk kemandirian, (2) dengan pembentukan organisasi lokal, lembaga-lembaga serta panitia-panitia dalam berbagai fungsi sosial akan mendorong terciptanya persatuan atau kekompakan, (3) mempertebal keyakinan mereka mengenal situasi dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah yang akan timbul.

Penyelenggaraan PMP sebagian besar bergantung pada pola pemilikan komponennya, baik yang dimiliki perorangan, koperasi, perusahaan, masyarakat atau pemerintah. Walaupun demikian, siapapun pemiliknya PMP adalah kumpulan fasilitas dan pelayanan untuk nelayan yang harus secara adil dan merata terjangkau oleh setiap nelayan. Dalam pelaksanaan sebuah kontrak, diperlukan kepercayaan dari

masyarakat atau saling percaya di antara mereka yang terlibat dalam PMP, sehingga akan menumbuhkan daya juang yang tulus dan menjamin keberhasilannya. Untuk menjamin kepercayaan ini berlangsung terus maka pencegahan terhadap penyimpangan, pencurian, penyelewengan, harus ditegakkan terutama dalam pengawasan.

Dalam penyelenggaraan pembinaan, berbagai inisiatif dapat datang dari UPP atau pihak di luar UPP seperti pemerintah atau kelembagaan lain, tetapi melalui UPP tersebut. Begitu juga dalam pelaksanaan pembinaan, UPP dapat menyertakan tenaga di luar UPP sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan, terutama dari masyarakat itu sendiri. Pemimpin Tim UPP harus mempunyai pengalaman yang cukup dalam pembangunan perikanan skala kecil, akan lebih baik lagi bila mempunyai keahlian khusus, di samping itu, memiliki persyaratan kepribadian yang cukup menarik bagi masyarakat nelayan, penyelenggara komponen PMP, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Strategi Komunikasi dalam Pembangunan PMP

Prinsip komunikasi adalah mengubah perilaku, strategi merupakan cara, metode, rencana atau pola yang dipergunakan dalam upaya menyampaikan pesan agar diikuti dengan perubahan perilakunya. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan pemrakarsa/perencana, pengawas penyelenggaraan dan pembina PMP. Strategi komunikasi pembangunan dalam pengembangan PMP ini dibagi ke dalam tahapan perencanaan, penyelenggaraan, dan tahap pembinaan.

Dalam tahap perencanaan, diperlukan pemrakarsa baik dari dalam maupun dari luar masyarakat nelayan, pada umumnya berasal dari luar. Strategi komunikasi diawali dengan perencanaan awal dan dilanjutkan dengan perencanaan akhir. Dalam perencanaan awal, tujuannya untuk menetapkan lokasi PMP dimana untuk mencapainya diperlukan upaya menggerakkan bentuk-bentuk dasar organisasi nelayan beserta partisipasinya untuk membuat studi kelayakan tentang lokasi, potensi-potensi sumberdaya, kekuatan pendukung dan penghambatnya, serta pola sikap dan perilaku nelayan. Keberhasilan perencanaan dalam meyakinkan ide dasar terutama dalam meyakinkan bahwa masyarakat secara terpadu dan bersama-sama dapat mengubah perilaku yang selama ini dinilai oleh orang luar ketinggalan sehingga mereka

berada dalam kelompok yang kurang beruntung. Faktor penting dalam tahap ini adalah tingkat pemahaman dan penerimaan warga masyarakat akan potensi yang dimiliki, serta keterlibatannya dalam perencanaan akan memantapkan penetapan lokasinya. Upaya yang dapat dilakukan oleh Tim yaitu, mengumpulkan sejumlah data, informasi secara lengkap dan akurat dalam penetapan lokasi PMP dengan segala dukungan serta kemungkinan hambatan yang dapat dicarikan alternatif pemecahannya.

Dalam perencanaan akhir, menyangkut rencana operasional PMP, maka tim perencanaannya mewakili seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PMP. Komposisi tim terdiri dari nelayan, wakil pemilik/penyelenggara fasilitas, wakil donor/pemerintah, dan dari tim ahli. Dalam tahap ini, ketua tim harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan yang akan dirumuskan dalam serangkaian kegiatan yang interelatif. Rumusan kegiatan yang tertuang dalam rencana induk juga memuat serangkaian kegiatan jangka panjang, termasuk rencana pembiayaan dalam garis besarnya, kejelasan sumber donaturnya, karena itu proses penyusunannya diperlukan kecermatan.

Dalam penyelenggaraan PMP, di mana indikator kefungsiannya dapat dilihat dari berfungsinya fasilitas dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat nelayan setempat. Berfungsinya fasilitas dan pelayanan ini terkait dengan pemilikan dan penyelenggara komponen-komponen PMP atau fasilitas tersebut. Namun, dalam hal yang prinsip siapapun pemilik dan penyelenggara harus berada dalam satu kesepakatan bahwa menjual dan melayani suatu jasa yang ada dalam keterjangkauan nelayan, di bawah pengawasan bersama dan dalam pembinaan UPP.

Strategi Komunikasi dalam Pembinaan PMP

Pembinaan ini menjadi tugas dari UPP (Unit Pembinaan Perikanan), bentuk tugasnya sebagai komunikator, pengawasan dan pembinaan operasional komponen-komponen PMP, bahkan UPP berfungsi sejak perencanaan. Pembinaan ini bertujuan menjaga agar penyelenggaraan PMP dapat berlangsung lancar dan agar dapat ditingkatkan peran masing-masing komponen, sehingga tujuan PMP dapat tercapai. Kecenderungan pelaksanaan pembinaan ini, inisiatifnya berasal dari pembina, baik atas dasar permasalahan yang ada dalam masyarakat itu atau pesan pemerintah.

Perubahan Perilaku Masyarakat

Dengan adanya PMP, perilaku masyarakat secara umum dalam memproduksi relatif lebih giat dan dinamis, dalam memenuhi kebutuhan untuk konsumsi lebih bebas tanpa ikatan pada juragan, serta perilaku pemenuhan kebutuhan sosial lainnya (pendidikan, kesehatan, keamanan), dapat terpenuhi dengan lebih baik dalam lingkungannya sendiri. Khususnya nelayan penangkap ikan yang tadinya dalam permodalan, peralatan, perbekalan ke laut ditentukan oleh juragan, merupakan pengikat pada nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya kepada juragan. Pada saat terakhir perkembangannya program pembangunan PMP, perilaku masyarakat mulai bergeser, para juragan sebagian besar menjadi pengusaha atau penyelenggara salah satu kelembagaan dalam PMP (perbengkelan, warung, penyalur BBM, pedagang ikan, penyedia es dsb) dan tidak semena-mena lagi. Nelayan memiliki kekuatan untuk berunding, karena mereka bergabung dalam kelompok-kelompok. Secara rinci, perubahan perilaku masyarakat nelayan yang meliputi beberapa aspek tertera sebagaimana Tabel 1.

KESIMPULAN

Membangun pedesaan khususnya masyarakat nelayan diperlukan pendekatan partisipatif dan prinsip keterpaduan. Pendekatan partisipatif ini melalui upaya menggerakkan bentuk-bentuk organisasi/kelompok paling dasar bersamaan dengan peransertanya untuk membangun diri dan lingkungannya. Prinsip keterpaduan bermakna vertikal dan horizontal. Keterpaduan vertikal terkait dengan rantai produksi perikanan dari segi pengelolaan sumber, penangkapan, pengolahan, pemasaran, termasuk pembuatan kapal dan bengkel. Keterpaduan horizontal dalam kaitannya dengan penerahan sumber di luar perikanan yang menunjang seperti PAM, listrik, pasar, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Dengan menggerakkan bentuk organisasi/kelompok paling dasar dalam masyarakat nelayan bersamaan dengan partisipasinya sehingga membentuk suatu ikatan/jalinan fungsi dan peran yang interaktif, sehingga terciptanya Pusat Masyarakat Perikanan (PMP). Komponen-komponen PMP terdiri dari: warga masyarakat nelayan, bentuk dasar organisasi (himpunan nelayan, himpunan pedagang, yayasan perkreditan), penyelenggara/pemilik fasilitas (perorangan, koperasi, swasta, atau pemerintah), tim pengawas, dan UPP.

Tabel 1 Perubahan Perilaku Masyarakat Nelayan

No.	Aspek Kegiatan	Perilaku Masyarakat	
		Sebelum ada PMP	Setelah ada PMP
1.	Aspek Produksi: Penyiapan bekal konsumsi Penyiapan alat tangkap, bahan bakar. Pembagian hasil.	Diambil secara utang pada Juragan Diambil secara utang pada Juragan. Diatur oleh juragan.	Dipersiapkan sendiri atau meminjam pada koperasi di PMP. Meminjam pada koperasi. Disepakati bersama dalam musyawarah antara pemilik kapal, nelayan, melalui kelompok perwakilannya di PMP.
2.	Pemasaran Hasil Tangkapan:	Dijual ke Juragan langsung. Dijual ke konsumen langsung.	Dijual melaiu pelanggan. Dapat ditukarkan barang atau jasa di lembaga yang ada di PMP.
3.	Pembekalan Kebutuhan: Konsumsi Perabot RT/lainnya.	Pada Juragan Ke pasar/toko di luar PMP.	Dapat di beli di lembaga yang ada di PMP. Lewat juragan dengan harga sama dengan di PMP.
4.	Pelayanan-pelayanan: Kesehatan dan Pendidikan	Tidak ada di desa, jauh ke kecamatan, sekolah di luar PMP.	Pelayanan rutin di kompleks PMP. Belajar (SD, MI) di kompleks PMP.
5.	Pelayanan Informasi Kenelayanan.	Ditentukan oleh Juragan.	Diperoleh dari UPP, atau setiap unit pelayanan.
6.	Tingkat Partisipasi	Terbatas pada partisipasi dalam pendanaan pembangunan.	Terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pembinaan/pengawasan.
7.	Perbekalan dan Depot Minyak.	Dikerjakan sendiri/ditentukan oleh Juragan	Tersedia bengkel di PMP dan tidak bergantung pada Juragan.
8.	Interaksi antar Nelayan, Nelayan dengan Juragan.	Interaksi antar nelayan sangat kurang. Tidak ada dialog, lebih ditentukan oleh Juragan.	Dapat berinteraksi antar nelayan melalui kelompoknya dengan dinamis. Dengan juragan dapat dialog, baik langsung atau perantaraan kelompok.
9.	Pengambilan Keputusan.	Ditentukan/terikat dengan Juragan.	Terkait dengan kelembagaan dan lebih mandiri.

Strategi komunikasi dalam pembangunan PMP ini pada hakikatnya merupakan cara untuk menggerakkan bentuk organisasi dasar dan partisipasi dari masyarakat nelayan dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan mengawasi PMP ini. Jadi, dalam pembangunan PMP ini lebih ditekankan pada pemberian pengalaman keikutsertaan nelayan dalam membangun diri dan lingkungannya sendiri.

Perubahan perilaku pada warga masyarakat dapat terjadi dengan digerakkannya kelompok/kelembagaan dasar di masyarakat bersama partisipasinya

melalui pembangunan PMP. Masyarakat mulai memahami diri mereka, posisinya dalam rangka pengembangan diri dan lingkungannya. Perubahan perilaku baik dalam aspek produksi, pemasaran, hingga pola konsumsinya, dan yang paling prinsip adanya perubahan pola hubungan yang statis, linier (juragan ke nelayan, petugas ke nelayan) menjadi lebih interaktif baik antar nelayan atau antara nelayan dengan juragan dengan pemilik dan pelayanan fasilitas-fasilitas, dengan pembina dan sebagainya, atau lebih interaktif antar komponen dalam PMP tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonim. 1983. *Perda Nomor 3 Tahun 1983*. Lampung.
- Ben-Yami. 1986. *Comunity Fisheries Centre: Guideline for Establismnt and Operation*. FAO Fish Tech.
- Chambers, D. 1984. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Terjemahan LP3ES. Jakarta.
- Conmyers. 1989. *Laporan Pengkajian Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan Bagi Nelayan*. Bogor: Ciawi.
- Jahi, A. 1984. *Komuniaksi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Leuer, H.R. 1989. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Terjemahan oleh Alimandau. Jakarta: Bina Aksara.
- Mardikanto. 1988. *Komunikasi Pembangunan*. Surakarta: UNS Press.
- Marzuki. 1992. *Sikap Nelayan terhadap Pelaksanaan Pelelangan Ikan*. Kasus di TPI Labuhan Maringgai. Bogor: IPB.
- Mubiyarto. 1988. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mubiyarto, dkk. 1984. *Nelayan dan kemiskinan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Nasution, Z. 1988. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Rajawali.
- Rogers, M.E. 1976. *Komunikasi dan Pembangunan Perspektif Kritis*. Terjemahan LP3ES. Jakarta: LP3ES.
- Sastroputro, S. 1985. *Partisipasi, Komunikasi, Persepsi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*.
- Slamet, Y. 1989. *Konsep-konsep Dasar Partisipasi Sosial*. Yogyakarta: PAU Gajahmada.
- Schramm, L. 1976. *Communication and Change*. Honolulu: An East-West Centre Book.

